

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) yang telah dilaksanakan secara langsung di apotek Anugerah Denpasar pada tanggal 03 Oktober – 05 November 2022 dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek membekali calon apoteker untuk memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek serta memberikan pengajaran untuk melaksanakan tugas, tanggung jawab dan kewajiban secara profesional, disiplin, berwawasan luas dan dapat menjalin hubungan kerja sama dengan tenaga kesehatan lainnya.
2. PKPA di Apotek memberikan contoh nyata bagi seorang calon apoteker dalam melakukan pekerjaan kefarmasian yang profesional di bidang pembuatan, pengadaan, hingga distribusi sediaan kefarmasian sesuai standar.
3. PKPA di Apotek memberikan pengalaman dan kesempatan bagi calon apoteker dalam melakukan pelayanan kefarmasian yang profesional di sarana Apotek sesuai standar dan kode etik kefarmasian.

5.2 Saran

Saran yang dapat diberikan selama melakukan Praktek Kerja Profesi Apoteker, yaitu:

1. Mahasiswa calon apoteker diharapkan dapat selalu mempersiapkan diri terlebih dahulu mengenai dasar pelayanan kefarmasian, undang-undang kefarmasian serta manajemen apotek.
2. Mahasiswa calon apoteker diharapkan berperan aktif dalam melaksanakan Praktek Kerja Profesi Apoteker sehingga wawasan, pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh lebih optimal.
3. Kegiatan pencatatan *patient medication record* dan *home pharmacy care* harus lebih dijalankan lagi guna mencatat dan memantau obat-obat yang diterima pasien demi perkembangan kesehatan pasien, serta membangun kepercayaan pasien terhadap pelayanan apoteker.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. “*Drug Interaction Checker*”. Medscape, WebMD LLC, Diakses pada November 2022, reference.medscape.com/drug-interactionchecker.
- Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), 2019, *Peraturan BPOM Nomor 14 Tahun 2019 tentang Penarikan dan Pemusnahan Obat yang Tidak Memenuhi Standar dan/atau Persyaratan Keamanan, Khasiat, Mutu, dan Label*, Badan Pengawas Obat dan Makanan, Jakarta
- Baxter, K., 2010, *Stockley’s Drug Interactions*, Ninth Edition, Pharmaceutical Press
- BNF, “*British National Formulary 80th ed*”, Royal Pharmaceutical Society (2021)
- Kementrian Kesehatan Republik Indonesia, 2019, *Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek*, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta
- Kementrian Kesehatan Republik Indonesia, 2019, *Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Apotek*, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1332 Tahun 2002, Jakarta
- McEvoy, G.K., 2011, *AHFS Drug Information*, American Society of Health System Pharmacists, Maryland.
- Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2009, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian*, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta
- Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2011, *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 889/MENKES/PER/V/2011 Tentang Registrasi, Izin Praktik, dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian*, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta
- Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2015, *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan dan Pelaporan Narkotika, Psicotropika dan Prekursor Farmasi*, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.

- Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2016, *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek*, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta
- Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2017, *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Apotek*, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta
- Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2018, *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan*, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta
- Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2021, *Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Nomor 1 Tahun 2021 tentang Integrasi Binmas Online System (BOS) dengan Online Single Submission (OSS)*, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta
- Presiden Republik Indonesia, 2009, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan*, Presiden Republik Indonesia, Jakarta.
- Presiden Republik Indonesia, 2014, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Kesehatan*, Presiden Republik Indonesia, Jakarta.
- Presiden Republik Indonesia, 2016, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan*, Presiden Republik Indonesia, Jakarta.
- Sweetman, S. C., 2009, *Martindale The Complete Drug Reference, ed 36th*, The Pharmaceutical Press, London